



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 67 TAHUN 2013**

#### **T E N T A N G**

#### **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk, Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan / atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan / atau udang dengan luasan tertentu.
16. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani / pekebun / peternak / petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten / kota.
22. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## **BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Riau serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2014.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2014.

### **Pasal 5**

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB III

### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

## Pasal 7

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/ Kota.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
  - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
  - Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
  - Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
  - Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompoktani, Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - Pupuk Urea = 50 kg;
  - Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - Pupuk ZA = 50 kg;
  - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg ;
  - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 2 Desember 2013

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Diundangkan : di Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 67**

Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPIK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	Z A	N P K	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	15.537	5.549	3.213	15.530	3.948
2	HORTIKULTURA	1.226	447	251	2.349	476
3	PERKEBUNAN RAKYAT	3.263	1.454	1.406	4.438	728
4	PETERNAKAN	643	223	130	483	148
5	PERIKANAN BUDIDAYA	732	426	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21.400</b>	<b>8.100</b>	<b>5.000</b>	<b>22.800</b>	<b>5.300</b>

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	15.537	1.457	1.150	1.360	1.425	1.451	1.175	954	777	993	1.182	1.604	2.008
2	HORTIKULTURA	1.226	115	91	107	112	114	93	75	62	78	93	127	158
3	PERKEBUNAN	3.263	306	242	286	299	305	247	200	163	209	248	337	422
4	PETERNAKAN	643	60	48	56	59	60	49	39	32	41	49	66	83
5	PERIKANAN BUDIDAYA	732	69	54	64	67	68	55	45	37	47	56	76	95
	<b>Jumlah</b>	<b>21.400</b>	<b>2.007</b>	<b>1.585</b>	<b>1.873</b>	<b>1.962</b>	<b>1.998</b>	<b>1.619</b>	<b>1.313</b>	<b>1.071</b>	<b>1.368</b>	<b>1.628</b>	<b>2.210</b>	<b>2.766</b>

Pi. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	5.549	549	553	567	573	514	365	258	193	329	448	589	611
2	HORTIKULTURA	447	44	45	46	46	41	29	21	16	27	36	47	49
3	PERKEBUNAN	1.454	144	145	148	150	135	96	68	51	86	117	154	160
4	PETERNAKAN	223	22,1	22,2	22,8	23,1	20,7	14,7	10,4	7,8	13,3	18,0	23,7	24,6
5	PERIKANAN BUDIDAYA	426	42	42	44	44	39	28	20	15	25	34	45	47
	<b>Jumlah</b>	<b>8.100</b>	<b>802</b>	<b>807</b>	<b>828</b>	<b>836</b>	<b>750</b>	<b>533</b>	<b>377</b>	<b>283</b>	<b>480</b>	<b>653</b>	<b>859</b>	<b>892</b>

Pj. **GUBERNUR RIAU,**

ttd.

H. DJOHERMANSYAH/DJOHAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	3.213	322	327	312	295	288	263	214	156	211	285	335	204
2	HORTIKULTURA	251	25	26	23	23	22	21	17	12	16	22	26	16
3	PERKEBUNAN	1.406	142	143	136	129	126	115	93	68	92	125	146	89
4	PETERNAKAN	130	12,7	12,7	12,5	11,7	11,9	11,0	9,0	6,0	9,0	12,0	14,0	8,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.000</b>	<b>502</b>	<b>510</b>	<b>485</b>	<b>460</b>	<b>449</b>	<b>410</b>	<b>333</b>	<b>242</b>	<b>328</b>	<b>444</b>	<b>521</b>	<b>317</b>

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK N P K BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN												( Ton )
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	TANAMAN PANGAN	15.530	1.393	1.606	1.618	1.696	1.404	1.227	865	605	863	1.193	1.476	1.585	
2	HORTIKULTURA	2.349	211	243	245	256	212	186	131	92	130	180	223	240	
3	PERKEBUNAN	4.438	398	459	463	485	401	351	247	173	246	341	422	453	
4	PETERNAKAN	483	43	50	50	53	44	38	27	19	27	37	46	49	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>22.800</b>	<b>2.045</b>	<b>2.357</b>	<b>2.376</b>	<b>2.490</b>	<b>2.061</b>	<b>1.802</b>	<b>1.270</b>	<b>889</b>	<b>1.266</b>	<b>1.751</b>	<b>2.167</b>	<b>2.327</b>	

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013 2

Tanggal : Desember 2013

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	3.948	254	314	393	404	372	249	310	221	248	336	426	421
2	HORTIKULTURA	476	31	38	47	49	45	30	37	27	30	40	51	52
3	PERKEBUNAN	728	47	58	72	74	69	46	57	41	46	62	78	78
4	PETERNAKAN	148	8,8	12,0	15,0	15,0	14,0	9,4	12,0	8,0	9,0	13,0	16,2	16,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.300</b>	<b>341</b>	<b>422</b>	<b>526</b>	<b>542</b>	<b>500</b>	<b>335</b>	<b>415</b>	<b>297</b>	<b>399</b>	<b>451</b>	<b>571</b>	<b>566</b>

( Ton )

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 67 Tahun 2013

Tanggal : 2 Desember 2013

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	U R E A	21.400	2.007	1.585	1.873	1.962	1.998	1.619	1.313	1.071	1.368	1.628	2.210	2.766
2	SP - 36	8.100	802	807	828	836	750	533	377	283	480	653	859	892
3	Z A	5.000	502	510	485	460	449	410	333	242	328	444	521	317
4	N P K	22.800	2.045	2.357	2.376	2.490	2.061	1.802	1.270	889	1.266	1.751	2.167	2.327
5	ORGANIK	5.300	341	422	526	542	500	335	415	297	333	451	571	566

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	354	24	31	23	33	36	30	21	23	24	16	23	70	
2	Kampar	1.914	155	120	153	180	129	185	154	103	121	164	218	232	
3	Rokan Hulu	1.370	128	88	94	107	110	75	75	74	69	113	215	222	
4	Rokan Hilir	2.308	216	178	183	197	189	167	175	126	137	202	245	293	
5	Indragiri Hulu	1.399	98	72	143	137	142	74	105	72	106	123	132	195	
6	Indragiri Hilir	1.901	231	152	256	185	174	165	85	65	101	106	187	194	
7	Kuantan Singingi	1.717	210	203	142	124	142	130	74	72	113	106	194	207	
8	Pelalawan	918	63	45	96	86	91	68	65	51	53	95	96	109	
9	Dumai	394	48	32	45	42	59	28	12	25	31	8	12	52	
10	Bengkalis	704	65	42	75	64	94	79	39	34	47	34	37	94	
11	Siak	2.101	193	165	125	244	245	135	111	98	128	178	205	274	
12	Kepulauan Meranti	456	26	22	25	26	40	39	38	34	63	37	40	66	
	<b>Jumlah</b>	<b>15.537</b>	<b>1.457</b>	<b>1.150</b>	<b>1.360</b>	<b>1.425</b>	<b>1.451</b>	<b>1.175</b>	<b>954</b>	<b>777</b>	<b>993</b>	<b>1.182</b>	<b>1.604</b>	<b>2.008</b>	

PJ. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	108	7	9	6	11	12	9	7	5	6	9	12	15	
2	Kampar	114	14	8	10	10	9	8	9	7	6	8	12	13	
3	Rokan Hulu	111	12	7	11	6	10	9	8	6	7	9	12	14	
4	Rokan Hilir	107	9	7	12	11	10	7	7	7	6	7	10	13	
5	Indragiri Hulu	113	9	8	9	11	12	8	6	6	10	8	12	14	
6	Indragiri Hilir	109	11	9	10	11	7	9	4	4	6	9	13	16	
7	Kuantan Singingi	121	10	10	10	12	12	10	4	4	8	10	14	17	
8	Pelalawan	105	10	8	11	12	10	8	4	4	7	8	10	13	
9	Dumai	106	12	8	13	8	10	8	5	5	5	8	10	14	
10	Bengkalis	77	6	7	5	5	6	7	7	5	6	7	6	9	
11	Siak	107	10	6	6	10	12	6	10	6	7	6	12	16	
12	Kepulauan Meranti	48	5	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.226</b>	<b>115</b>	<b>91</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>93</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>127</b>	<b>158</b>	

( Ton )

PJ. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH PJOHAN

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	19	2	1	2	1	2	2	0	2	2	1	2	2
2	Kampar	481	44	30	47	45	45	45	34	21	25	31	58	66
3	Rokan Hulu	454	41	36	39	44	46	46	24	25	30	32	51	44
4	Rokan Hilir	329	31	26	26	40	30	30	21	12	25	27	29	35
5	Indragiri Hulu	336	38	29	25	28	37	37	24	20	22	20	26	42
6	Indragiri Hilir	416	33	28	37	41	43	43	26	25	25	34	44	48
7	Kuantan Singingi	298	33	23	27	26	23	23	16	16	16	18	29	49
8	Pelalawan	222	18	16	19	16	17	17	11	14	17	20	25	36
9	Dumai	39	4	2	3	2	3	3	3	2	4	5	4	4
10	Bengkalis	228	26	16	22	15	16	16	13	10	16	23	24	35
11	Siak	417	34	33	37	38	41	41	27	15	25	35	42	59
12	Kepulauan Meranti	23	2	1	2	3	2	2	1	1	2	2	3	2
	<b>Jumlah</b>	<b>3.263</b>	<b>306</b>	<b>242</b>	<b>286</b>	<b>299</b>	<b>305</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>163</b>	<b>209</b>	<b>248</b>	<b>337</b>	<b>422</b>

PJ. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran XI : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												( Ton )	
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Pekanbaru	39	3	3	2	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
2	Kampar	81	8	5	8	7	8	6	4	3	5	7	10	10	10	10
3	Rokan Hulu	76	8	6	6	7	8	6	5	4	4	6	8	8	8	8
4	Rokan Hilir	66	5	4	7	6	7	7	6	3	4	5	8	8	8	8
5	Indragiri Hulu	60	6	4	5	4	4	5	4	3	3	4	7	11	11	11
6	Indragiri Hilir	61	5	5	5	5	6	6	3	3	2	5	8	10	10	10
7	Kuantan Singingi	61	5	4	4	6	7	5	3	3	4	5	6	9	9	9
8	Pelalawan	36	4	4	4	3	1	1	3	3	3	1	2	7	7	7
9	Dumai	25	3	2	2	2	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2
10	Bengkalis	42	4	4	5	5	3	4	2	2	3	2	3	5	5	5
11	Siak	71	7	5	7	8	7	5	4	3	5	6	6	8	8	8
12	Kepulauan Meranti	24	2	2	1	2	3	2	3	1	3	2	2	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>643</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOCHAN

Lampiran XIV : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												( Ton )
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pekanbaru	29	2	4	4	5	3	2	2	0	2	1	2	2	
2	Kampar	52	6	6	5	6	3	2	2	3	2	4	6	6	
3	Rokan Hulu	46	4	4	3	4	5	3	3	2	3	3	7	6	
4	Rokan Hilir	52	5	6	6	5	4	3	3	3	2	5	5	5	
5	Indragiri Hulu	42	5	4	4	5	5	4	4	2	3	3	4	3	
6	Indragiri Hilir	45	4	5	5	4	3	4	4	1	2	3	6	6	
7	Kuantan Singingi	35	5	4	4	3	2	3	3	1	2	3	4	3	
8	Pelalawan	28	3	2	3	3	4	2	2	1	2	2	2	2	
9	Dumai	22	2	2	3	1	2	0	3	3	3	4	1	1	
10	Bengkalis	34	2	3	3	5	4	3	3	0	2	2	2	8	
11	Siak	48	5	4	4	4	5	3	3	3	3	4	6	5	
12	Kepulauan Meranti	14	1	1	2	1	1	1	0	0	1	2	2	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>447</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Lampiran XV : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	14	2	1	1	2	1	0	0	0	1	2	2	2	2
2	Kampar	215	21	22	19	20	22	10	10	9	12	19	24	27	27
3	Rokan Hulu	216	24	23	23	20	22	14	9	6	13	14	27	21	21
4	Rokan Hilir	218	18	20	28	22	25	13	5	6	14	17	23	27	27
5	Indragiri Hulu	93	7	9	9	9	7	8	5	4	3	4	10	18	18
6	Indragiri Hilir	190	16	18	20	29	16	13	6	6	13	19	17	17	17
7	Kuantan Singingi	159	14	17	17	18	14	12	9	5	12	13	14	14	14
8	Pelalawan	53	5	6	6	7	5	4	3	2	3	2	5	5	5
9	Dumai	31	5	3	2	2	1	2	3	0	1	2	4	6	6
10	Bengkalis	50	8	9	5	4	6	2	2	0	2	2	5	5	5
11	Siak	196	22	15	15	16	15	17	15	13	11	21	21	15	15
12	Kepulauan Meranti	19	2	2	3	1	1	1	1	0	1	2	2	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1.454</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>86</b>	<b>117</b>	<b>154</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOFAN**

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des		
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov				
1	Pekanbaru	11,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Kampar	22,8	2,0	2,0	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,4	2,0	3,0
3	Rokan Hulu	21,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,3	2,0	3,0
4	Rokan Hilir	19,8	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,6
5	Indragiri Hulu	24,5	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,8	1,7	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0
6	Indragiri Hilir	23,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0
7	Kuantan Singingi	21,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
8	Pelalawan	16,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
9	Dumai	13,1	1,1	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0
10	Bengkalis	19,4	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11	Siak	24,3	2,0	2,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12	Kepulauan Meranti	7,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Jumlah</b>	<b>223,4</b>	<b>22,1</b>	<b>22,2</b>	<b>22,8</b>	<b>23,1</b>	<b>20,7</b>	<b>14,7</b>	<b>10,4</b>	<b>7,8</b>	<b>13,3</b>	<b>18,0</b>	<b>23,7</b>	<b>24,6</b>			

**PJ. GOVERNUR RIAU**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI**  
**SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	16	1	1	1	1	1	2	2	2	0	1	2	2	2
2	Kampar	59	7	7	7	7	7	5	5	2	3	3	3	5	5
3	Rokan Hulu	47	5	5	5	5	4	4	2	2	2	3	3	4	5
4	Rokan Hilir	40	3	3	5	4	3	2	2	2	2	2	3	5	6
5	Indragiri Hulu	34	3	3	3	3	3	2	1	0	0	3	4	5	4
6	Indragiri Hilir	53	6	6	6	6	6	3	2	2	2	2	4	6	4
7	Kuantan Singingi	40	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	3	4	4
8	Pelalawan	33	4	4	4	4	4	2	2	2	0	4	3	1	1
9	Dumai	23	2	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	4	4
10	Bengkalis	31	3	3	3	3	3	2	1	1	1	0	4	3	5
11	Siak	41	4	4	4	5	4	2	1	2	2	2	3	5	5
12	Kepulauan Meranti	8	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>426</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	

**Pj. GUBERNUR-RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Lampiran XVIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	114	10	11	10	10	9	8	7	9	12	13	5		
2	Kampar	366	37	38	36	31	29	20	19	25	33	40	33		
3	Rokan Hulu	368	38	37	35	34	32	21	18	24	31	34	30		
4	Rokan Hilir	364	35	36	35	37	32	18	19	27	36	38	27		
5	Indragiri Hulu	275	32	33	31	24	29	16	17	17	13	20	11		
6	Indragiri Hilir	313	35	35	32	26	22	21	18	19	26	36	21		
7	Kuantan Singingi	321	32	33	27	26	22	22	20	24	27	39	22		
8	Pelalawan	183	19	17	18	16	20	18	7	9	16	17	7		
9	Dumai	147	11	13	13	17	24	13	6	6	8	8	6		
10	Bengkalis	315	30	34	35	38	35	23	5	12	31	33	15		
11	Siak	352	35	33	33	28	21	28	15	32	37	42	22		
12	Kepulauan Meranti	97	8	7	8	8	7	6	5	7	13	14	5		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.213</b>	<b>322</b>	<b>327</b>	<b>312</b>	<b>295</b>	<b>288</b>	<b>263</b>	<b>156</b>	<b>211</b>	<b>285</b>	<b>335</b>	<b>204</b>		

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**r. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des	
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov			
1	Pekanbaru	8	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
2	Kampar	25	3	3	3	2	3	3	2	2	1	1	2	1	2	2
3	Rokan Hulu	24	3	3	3	2	3	3	2	2	1	1	2	0	2	2
4	Rokan Hilir	26	3	3	2	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	1
5	Indragiri Hulu	26	3	2	3	1	2	2	2	2	3	1	2	2	3	2
6	Indragiri Hilir	25	1	2	1	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3	2
7	Kuantan Singingi	23	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	1	2
8	Pelalawan	21	1	2	1	3	3	1	2	2	3	0	1	3	3	1
9	Dumai	19	1	2	1	3	3	1	1	1	2	1	1	2	3	1
10	Bengkalis	14	2	3	1	2	2	1	1	1	0	1	0	1	2	0
11	Siak	28	4	3	3	2	2	2	3	2	2	2	1	3	2	1
12	Kepulauan Meranti	10	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>251</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	

PJ. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran XX : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	11	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	2	1	
2	Kampar	157	18	16	16	14	15	15	8	5	8	14	18	10	
3	Rokan Hulu	151	10	18	18	12	14	14	9	5	9	14	19	9	
4	Rokan Hilir	155	20	19	14	15	13	12	9	6	9	13	16	9	
5	Indragiri Hulu	130	12	11	11	12	12	12	10	6	10	12	13	11	
6	Indragiri Hilir	162	20	19	19	13	13	13	11	7	11	13	16	7	
7	Kuantan Singingi	144	21	18	18	11	9	9	12	5	11	9	12	6	
8	Pelalawan	86	5	4	5	10	9	9	8	5	8	9	7	8	
9	Dumai	35	2	3	3	4	3	3	3	0	3	3	4	3	
10	Bengkalis	147	12	13	15	17	16	16	9	14	6	16	17	6	
11	Siak	189	18	17	14	16	16	16	15	15	14	16	18	16	
12	Kepulauan Meranti	38	4	4	3	3	5	5	3	0	2	5	4	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.406</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>136</b>	<b>129</b>	<b>126</b>	<b>115</b>	<b>93</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>125</b>	<b>146</b>	<b>89</b>	

Pj. GUBERNUR RIAU:

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Lampiran XXI : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des	
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov			
1	Pekanbaru	8	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
2	Kampar	14	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
3	Rokan Hulu	14	2	2	2	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
4	Rokan Hilir	10	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
5	Indragiri Hulu	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
6	Indragiri Hilir	11	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1
7	Kuantan Singingi	12	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1
8	Pelalawan	7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
9	Dumai	10	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0
10	Bengkalis	12	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
11	Siak	17	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1
12	Kepulauan Meranti	6	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	

**PI. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH BOJAHAN**

Lampiran XXII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	314	31	36	28	33	26	24	14	16	14	26	26	26	40
2	Kampar	1.951	161	187	197	209	191	162	109	64	110	133	191	237	
3	Rokan Hulu	1.978	149	183	193	212	218	159	85	60	85	153	218	263	
4	Rokan Hilir	2.157	197	228	225	308	216	145	125	63	105	134	216	195	
5	Indragiri Hulu	1.666	130	193	191	184	133	122	135	69	135	122	133	119	
6	Indragiri Hilir	1.707	183	198	187	160	138	131	95	87	91	141	138	158	
7	Kuantan Singingi	1.524	149	150	147	156	135	152	82	50	82	132	145	144	
8	Pelalawan	814	64	65	70	88	74	58	49	34	49	68	94	101	
9	Dumai	575	51	53	54	55	55	49	36	21	36	49	55	62	
10	Bengkalis	1.087	108	126	136	124	86	92	49	44	49	92	86	95	
11	Siak	1.469	149	161	160	135	111	106	69	85	90	116	146	141	
12	Kepulauan Meranti	288	21	26	31	32	21	27	17	12	17	27	28	30	
	<b>Jumlah</b>	<b>15.530</b>	<b>1.393</b>	<b>1.606</b>	<b>1.618</b>	<b>1.696</b>	<b>1.404</b>	<b>1.227</b>	<b>865</b>	<b>605</b>	<b>863</b>	<b>1.193</b>	<b>1.476</b>	<b>1.585</b>	

**PJ. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	102	11	16	16	15	8	4	2	1	2	4	11	12	
2	Kampar	270	27	28	25	25	25	23	16	12	16	21	26	26	
3	Rokan Hulu	265	23	24	27	21	19	23	17	11	17	23	27	33	
4	Rokan Hilir	257	20	27	27	26	20	18	16	12	16	18	28	29	
5	Indragiri Hulu	201	15	16	15	16	19	16	16	13	16	16	19	24	
6	Indragiri Hilir	252	26	30	25	17	20	20	19	10	18	20	20	27	
7	Kuantan Singingi	200	16	17	19	23	21	14	14	9	14	14	16	23	
8	Pelalawan	167	12	16	16	23	22	21	6	3	6	17	15	10	
9	Dumai	125	14	15	15	16	9	10	6	4	6	10	14	6	
10	Bengkalis	174	14	20	26	26	16	14	7	4	7	14	14	12	
11	Siak	287	29	29	28	39	29	20	10	12	10	20	29	32	
12	Kepulauan Meranti	48	4	5	6	9	4	3	2	1	2	3	4	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.349</b>	<b>211</b>	<b>243</b>	<b>245</b>	<b>256</b>	<b>212</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>92</b>	<b>130</b>	<b>180</b>	<b>223</b>	<b>240</b>	

**PL. GUBERNUR/RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	17	1	3	2	1	2	2	1	0	1	2	2	2	
2	Kampar	605	45	53	68	73	57	52	35	19	45	53	62	62	
3	Rokan Hulu	612	45	68	67	76	54	61	31	19	44	52	63	63	
4	Rokan Hilir	641	53	74	73	66	54	47	43	14	49	65	66	66	
5	Indragiri Hulu	306	29	37	29	39	27	25	15	14	21	28	27	27	
6	Indragiri Hilir	474	40	46	45	52	46	42	31	20	33	48	49	49	
7	Kuantan Singingi	502	55	47	46	47	47	50	39	26	32	41	42	42	
8	Pelalawan	248	25	32	22	26	15	10	6	7	31	34	33	33	
9	Dumai	77	9	5	4	5	6	5	5	8	8	9	9	9	
10	Bengkalis	327	43	38	38	34	38	14	6	13	26	31	32	32	
11	Siak	575	48	50	63	60	50	38	33	30	46	54	65	65	
12	Kepulauan Meranti	55	5	6	6	6	5	5	2	3	5	5	3	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.438</b>	<b>398</b>	<b>459</b>	<b>463</b>	<b>485</b>	<b>401</b>	<b>351</b>	<b>247</b>	<b>173</b>	<b>341</b>	<b>422</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	

**Pj. GUBERNUR/RIAU**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des	
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov			
1	Pekanbaru	15	2	1	2	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
2	Kampar	55	5	5	5	6	5	5	3	2	2	2	6	6	6	5
3	Rokan Hulu	53	5	5	5	6	4	5	3	2	2	3	5	4	4	6
4	Rokan Hilir	47	4	4	3	7	5	4	2	1	2	2	5	5	5	5
5	Indragiri Hulu	46	3	4	4	6	5	3	3	2	3	3	3	3	5	5
6	Indragiri Hilir	53	5	5	5	5	5	3	5	2	5	5	3	3	5	5
7	Kuantan Singingi	51	2	4	4	3	8	2	4	2	2	4	2	2	8	8
8	Pelalawan	24	3	3	3	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	3
9	Dumai	25	4	4	4	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2
10	Bengkalis	40	4	5	5	5	2	4	2	2	2	2	3	3	3	3
11	Siak	61	5	7	7	8	5	6	3	3	3	3	4	4	5	5
12	Kepulauan Meranti	13	1	3	3	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>483</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	

Pj. ~~GUBERNUR~~ RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	103	7	8	9	11	10	5	6	3	10	9	12	13	
2	Kampar	456	36	38	37	48	42	29	38	26	31	33	54	44	
3	Rokan Hulu	414	33	34	38	45	48	31	31	18	17	31	43	45	
4	Rokan Hilir	383	29	39	36	30	33	36	25	24	26	33	36	36	
5	Indragiri Hulu	383	21	32	46	43	36	24	31	22	24	38	33	33	
6	Indragiri Hilir	405	21	24	52	42	36	31	30	27	25	31	38	48	
7	Kuantan Singingi	399	27	31	32	42	42	25	35	23	25	35	41	41	
8	Pelalawan	362	24	37	33	32	25	11	24	16	28	41	45	46	
9	Dumai	267	12	12	18	32	29	18	28	20	15	26	28	28	
10	Bengkalis	263	15	17	34	28	20	14	16	12	13	21	41	32	
11	Siak	437	26	34	49	43	44	21	39	25	29	35	46	46	
12	Kepulauan Meranti	77	3	8	9	8	7	4	7	5	5	4	8	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.948</b>	<b>254</b>	<b>314</b>	<b>393</b>	<b>404</b>	<b>372</b>	<b>249</b>	<b>310</b>	<b>221</b>	<b>248</b>	<b>336</b>	<b>426</b>	<b>421</b>	

**PI. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH/DJOHAN**

Lampiran XXVII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 67 Tahun 2013  
 Tanggal : 2 Desember 2013

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	30	4	2	3	3	3	2	2	1	3	2	1	1
2	Kampar	57	4	6	4	5	5	3	6	4	4	5	5	6
3	Rokan Hulu	58	3	5	6	5	5	5	4	3	5	5	6	5
4	Rokan Hilir	52	3	5	5	5	5	5	4	3	2	4	5	6
5	Indragiri Hulu	44	3	3	5	5	3	4	4	2	2	5	5	4
6	Indragiri Hilir	34	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	4	4
7	Kuantan Singingi	49	2	2	5	4	6	3	5	2	1	3	8	7
8	Pelalawan	36	3	3	5	5	2	2	2	-	1	2	5	5
9	Dumai	26	1	2	2	4	3	1	1	3	3	2	2	2
10	Bengkalis	26	0	2	2	3	3	0	2	1	2	3	3	3
11	Siak	52	3	5	5	6	5	3	3	3	3	4	5	6
12	Kepulauan Meranti	14	1	1	2	1	2	0	0	2	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>476</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>52</b>

**PJ. GUBERNUR RIAU;**

ttd.

**I. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	12	-	1	2	2	1	0	2	0	1	1	1	1	1
2	Kampar	105	8	7	10	11	12	5	10	7	5	10	8	8	12
3	Rokan Hulu	94	6	7	9	10	8	7	7	5	4	6	12	13	13
4	Rokan Hilir	73	4	5	6	7	5	5	6	4	5	9	8	8	9
5	Indragiri Hulu	60	3	4	6	7	6	4	5	4	4	4	8	8	5
6	Indragiri Hilir	73	6	6	7	8	7	6	5	5	3	6	8	8	6
7	Kuantan Singingi	60	4	5	7	6	6	4	5	2	4	5	6	6	6
8	Pelalawan	42	3	4	5	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3
9	Dumai	25	0	5	2	2	0	3	0	0	5	2	4	2	2
10	Bengkalis	64	5	5	6	8	6	4	6	5	3	4	6	6	6
11	Siak	103	8	8	10	9	11	4	7	4	8	9	12	13	13
12	Kepulauan Meranti	17	0	1	2	1	4	0	1	1	0	3	2	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>728</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>69</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOFAN

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN												Des
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov		
1	Pekanbaru	9	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
2	Kampar	15	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	1	2	2
3	Rokan Hulu	10	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
4	Rokan Hilir	11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
5	Indragiri Hulu	11	0	1	1	2	2	1	1	1	0	0	1	1	2
6	Indragiri Hilir	11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
7	Kuantan Singingi	16	1	1	3	2	2	1	1	1	0	0	2	2	2
8	Pelalawan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Dumai	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Bengkalis	14	1	1	1	1	1	2	1	1	2	0	1	2	1
11	Siak	20	2	2	2	2	2	2	1	2	0	2	1	2	2
12	Kepulauan Meranti	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>148</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN